

26 Pegawai Negeri Kabupaten Tegal Dipecat

SLAWI — Dalam kurun 2010 terdapat 26 pegawai negeri di Kabupaten Tegal yang dipecat secara tak terhormat. Rata-rata mereka dipecat karena mangkir dari tempat kerja, melakukan tindakan penipuan, penggelapan uang negara, dan berselingkuh.

“Ini mesti dijadikan catatan bagi sejumlah pegawai negeri lain, termasuk para calon pegawai negeri yang baru memulai kerja per April ini,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal Retno Suprobowati kemarin.

Menurut Retno, pegawai negeri yang telah dipecat tersebut tak mendapatkan uang pensiun karena tergolong dalam kategori kesalahan berat. Saat ini Badan Kepegawaian juga tengah menangani sejumlah pegawai negeri yang terancam diberhentikan. Namun dia belum mau memberi keterangan.

“Yang jelas, sanksi kali ini lebih berat dibanding tahun sebelumnya. Ini berkaitan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” Retno menambahkan.

Retno mengaku, dalam aturan baru, pegawai negeri yang tidak masuk kerja tanpa izin sebanyak 46 hari selama setahun dapat diberhentikan. Ia berharap pegawai negeri Kabupaten Tegal menaati semua aturan tentang disiplin pegawai negeri.

Sikap tegas pemerintah ini didukung dewan perwakilan rakyat daerah. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Dzakhir, misalnya, mengatakan pemecatan sejumlah pegawai negeri itu wajar. Cuma, ia menyayangkan Badan Kepegawaian Daerah tidak memberi tahu DPRD soal kebijakan pemecatan ini terlebih dulu.

“Kebijakan pemecatan pegawai ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi tahun 2010, termasuk pengurangan anggaran dari gaji yang sebelumnya telah diterima pegawai negeri,” ujar Dzakhir.

DPRD berencana memanggil Retno untuk meminta penjelasan menyangkut alokasi belanja untuk pegawai yang dinyatakan telah dipecat. “Kalau ada pemecatan, berarti harus ada anggaran yang telah dihentikan. Itu harus kami ketahui,” kata Dzakhir. ● EDI FAISOL



ARIS ANDRIANTO (TEMPO)

Trauma Tsunami

Puluhan perahu nelayan ditambatkan di Pantai Rawajurit, Cilacap, Jawa Tengah, kemarin. Nelayan di pesisir Cilacap memilih tidak melaut karena takut terjadi tsunami setelah terjadi gempa 7,1 skala Richter kemarin dinihari.

PEMILIHAN WALI KOTA YOGYAKARTA 2011 Hanafi Rais Ikut Seleksi Partai Golkar

Para pelamar harus menyatakan mendukung penetapan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY.

YOGYAKARTA — Hingga kemarin tercatat sudah tiga orang mengambil formulir pendaftaran untuk seleksi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta dari Partai Golkar. Mereka adalah Hanafi Rais, dari Partai Amanat Nasional (PAN); Kuwat Indriyanto, yang resmi didukung Koalisi Mataram; dan kader Golkar yang juga anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Mulyono. Hanafi mengambil formulir pendaftaran calon wali kota, sedangkan Kuwat dan Agus mengambil formulir pendaftaran calon wakil wali kota.

“Pengambilan formulir Hanafi dilakukan oleh tim suksesnya, Jumat lalu. Kuwat datang bersama tim suksesnya, Sabtu lalu, dan Agus datang sendiri hari ini,” ujar Wahyu Jatmiko, anggota Tim 15 Persiapan Pemilihan Wali Kota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Yogyakarta, kepada *Tempo* kemarin. Tapi belum satu pun dari mereka mengembali-

kan formulir yang diambil.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar membuka peluang bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota melalui partai itu. Pendaftaran telah dibuka sejak bulan ini dan akan ditutup akhir pekan ini. Adapun untuk pengambilan formulir pendaftaran, dibatasi cuma sampai Kamis mendatang.

“Semua figur yang selama ini menyatakan akan maju ke pemilihan wali kota boleh mendaftar karena belum ada yang menandatangani secara resmi pencalonannya oleh salah satu partai politik,” kata Jatmiko. Ditanyai *Tempo*, Ketua DPD PAN Kota Yogyakarta yang juga anggota tim sukses Hanafi Rais, Heroe Poerwadi, membenarkan hal itu. Menurut dia, Hanafi serius akan mendaftar dalam proses seleksi calon Wali Kota Yogyakarta dari Partai Golkar.

Menurut Heroe, mereka ingin menjalin komunikasi yang lebih erat antara pendukung Hanafi dan Partai Golkar. Dia mengharapkan sikap politik Hanafi ini akan menyelaraskan pandangan pendukung Hanafi dengan Partai Golkar. “Kami menghargai kesempatan yang diberikan oleh Golkar. Hanafi akan segera mengembalikan for-

mulir yang sudah diambil,” ujarnya.

Ada pula konfirmasi yang datang dari kubu Kuwat Indriyanto. Menurut Sekretaris Koalisi Mataram Karmanil Khamdi, Kuwat akan segera mengembalikan formulir pendaftaran yang dia ambil sebelum tenggat. “Nanti Koalisi bersama Gerindra dan Kuwat akan datang bersama ke Sekretariat DPD Golkar Kota Yogyakarta,” ujarnya.

Golkar menetapkan dua prasyarat bagi para pelamar. Pertama, harus menyatakan mendukung penetapan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY. Kedua, belum secara resmi menjadi calon yang diusung oleh partai politik lain.

“Pendaftar yang ingin kami rekomendasikan harus mendukung penetapan, karena ini isu penting di Kota Yogyakarta,” kata R. Artiyadi, Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta.

Pendaftar yang memenuhi prasyarat akan diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Jakarta. Menurut jadwal, keputusan DPP Golkar akan disampaikan pada awal Mei nanti. Menurut Artiyadi, DPP akan meminta Lembaga Survei Indonesia melakukan survei untuk mengetahui penerimaan publik Kota Yogyakarta terhadap figur-figur tersebut. ● ADDI MAWAHIBUN IDHOM

KILAS

Kota Mandiri Terus Dipersoalkan

BANTUL — Pembubaran proyek perumahan kawasan Bantul Kota Mandiri (BKM) yang berada di Kecamatan Pajangan, Bantul, masih menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul. Dalam sidang paripurna laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2010 di gedung DPRD Bantul kemarin, Dewan menyatakan sangat menyayangkan penghentian itu, mengingat kawasan BKM telah ditetapkan sebagai kawasan strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030.

“Apa alasannya? Asetnya sekarang bagaimana? Berapa hektare tanah yang sudah disertifikasi? Kalau tak ada penjelasan, jangan-jangan diagunkan,” kata Amir Syarifuddin, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Mantan Sekretaris Daerah Bantul, Gendut Soedarto, pernah mengatakan, dalam proyek ini Bantul menyediakan lahan seluas 32 hektare dan mengucurkan dana Rp 5,3 miliar. Pemerintah juga telah menyetorkan Rp 4 miliar sebagai modal patungan PT Bantul Kota Mandiri, yang dibentuk bersama PT Perwita Karya.

Pernah ada usul untuk membentuk panitia khusus guna menelusuri kasus ini, tapi gugur dalam voting di rapat Badan Musyawarah dua minggu lalu.

● PRIBADI WICAKSONO

Pungutan di Jembatan Timbang

SEMARANG — Penarikan pajak dan retribusi kendaraan bermuatan di jembatan timbang sudah tidak diperbolehkan lagi menyusul adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang efektif berlaku sejak 1 Januari lalu. Namun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tetap melakukan pungutan terhadap kendaraan bermuatan yang melintas di jembatan timbang yang ada di wilayahnya.

Tapi, dalam diskusi dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah kemarin, Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Untung Sirinanto membantah hal itu. Menurut dia, sebenarnya untuk kendaraan dengan kelebihan hingga 25 persen, hanya diberi surat peringatan. “Karena kebiasaan para sopir ini memberi uang,” katanya. Menurut dia, uang tersebut dikembalikan setelah mereka membuat berita acara pengembalian.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi mengusulkan agar dibuat peraturan daerah untuk mengatasi masalah jembatan timbang tersebut.

● ROFIUDIN

Nasdem Daerah di Jawa Tengah Segera Lakukan Deklarasi

SEMARANG — Organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat (Nasdem) wilayah Jawa Tengah terus melebarkan sayapnya. Ketua Nasional Demokrat Jawa Tengah Rustriningsih mengatakan, pada April ini, kepengurusan di 35 kabupaten/kota akan terbentuk. “Deklarasinya kemungkinan besar dilakukan pada 14 atau 15 April mendatang,” ujarnya kemarin.

Nantinya, deklarasi Nasdem kabupaten/kota dilakukan secara serentak di satu tempat. Diperkirakan ada se-

kitar 50 orang yang terlibat dalam kepengurusan di setiap kabupaten/kota.

Selain membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, Nasional Demokrat Jawa Tengah masih terus merekrut anggota. Saat ini, kata Rustri, sudah ada sekitar 20 ribu warga yang masuk sebagai anggota Nasdem.

Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi dan Keanggotaan Nasional Demokrat Samuel Nitisaputra mengatakan sejauh ini baru ada empat pr-

ovinsi yang kepengurusan Nasional Demokrat-nya di tingkat kabupaten/kota sudah terbentuk, yakni Banten, Gorontalo, Aceh, dan Sulawesi Barat. Ditargetkan pada ulang tahun kedua, nantinya di seluruh kabupaten/kota sudah terbentuk kepengurusan Nasional Demokrat.

Sementara Rusti menyiapkan kepengurusan Nasional Demokrat di kabupaten/kota, isu bahwa organisasi kemasyarakatan ini akan dijadikan sebagai partai terus beredar. Bahkan,

dalam rapat pimpinan wilayah di Semarang kemarin, Rusti secara terbuka mengatakan, yang diam-diam merintis Partai Nasional Demokrat adalah Siswadi Selodipuro. Siswadi saat ini menjabat Wakil Ketua Nasional Demokrat Jawa Tengah.

Kepada *Tempo*, Siswadi tidak membantah hal itu. Malah dia mengaku mendapatkan mandat dari pengurus pusat untuk merintis pembentukan Partai Nasdem di Jawa Tengah. ● ROFIUDIN